



► PENCEGAHAN KORUPSI

Perizinan di Pemkot Diubah

JOGJA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyarankan agar Pemkot Jogja mengubah mekanisme perizinan di wilayah ini menyusul adanya kasus dugaan korupsi perizinan yang menjerat eks Wali Kota Haryadi Suyuti.

Yosef Leon
yosef@harianjogja.com

Pemkot disarankan mengintegrasikan seluruh proses perizinan lewat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) untuk mencegah kasus suap di lingkungan setempat berulang. Pengurusan izin di tataran teknis diminta tidak dilakukan karena dinilai rawan korupsi.

Spesialis Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan Direktorat Korsup Wilayah III KPK, Ben Hardy Saragih mengatakan penanggulangan korupsi di suatu instansi tidak berhenti dengan adanya penindakan terhadap tersangka

- Pemkot disarankan mengintegrasikan seluruh proses perizinan.
- Penanggulangan korupsi di suatu instansi tidak berhenti dengan adanya penindakan oleh KPK.

kasus suap perizinan di Kota Jogja. Hal itu ditindaklanjuti dengan laporan kepada bidang pencegahan untuk memberikan bimbingan dan masukan kepada instansi terkait agar kejadian serupa tidak terulang.

“Terkait proses pencegahan dalam perizinan, ada hal-hal yang perlu kita monitor bersama supaya tidak terjadi lagi penindakan. Pengawasan perizinan dimasukkan dalam MCP [*Monitoring Center for Prevention*]. Kami harapkan proaktif juga dari Inspektorat dalam pengawasan,” ujarnya, Selasa (11/10).

Penjabat Wali Kota Jogja, Sumadi menyampaikan pihaknya telah membuat langkah-langkah dan pencermatan semua regulasi terkait perizinan. Misalnya terkait tata ruang, bangunan gedung dan lain sebagainya. Namun sebagai penjabat wali

kota, untuk mengubah regulasi harus meminta izin ke Pemerintah Pusat dan sampai sekarang belum ada tindak lanjut.

“Catatan dari KPK dalam rangka *monitoring* dan evaluasi pada prinsipnya akan kami tindak lanjuti. Ini merupakan masukan bagi kami terutama dari hal regulasi dan SOP [standar operasional prosedur],” kata Sumadi.

Di sisi lain, Sumadi menyampaikan secara internal, jajaran Pemkot Jogja sudah membenahi SOP guna perbaikan proses perizinan. Instansi khususnya di perizinan diminta untuk taat asas sesuai prosedur, sehingga tidak ada tawar menawar maupun komitmen-komitmen lain.

“Kami sebenarnya sudah menyiapkan konsep SOP. Tapi ada masukan yang perlu kami tindak lanjuti. Salah satunya berkaitan dengan sistemnya,” kata dia.

Seperti diketahui eks Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti, pejabat Pemkot serta pengembang properti dijerat korupsi suap perizinan pembangunan apartemen Royal Kedhaton beberapa waktu lalu. Para tersangka kini sudah mendekam di tahanan.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005